



Pengaruh Keberagaman Gender Dewan Komisaris terhadap Praktik Greenwashing pada Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Annisa Alifa Ramadhani^{1*}, Lini Ingriyani², Fajriana Khusnul Khotimah³,
Rizqy Ahmad Fadillah⁴, Azzahra Andika Salsabila⁵

Politeknik Negeri Jakarta
annisa.alifa.r@akuntansi.pnj.ac.id^{1*}

Menerima: 20 Agustus 2026 | Diterima: 20 September 2026 | Diterbitkan: 25 September 2026

*Korespondensi Penulis

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen perempuan terhadap praktik *greenwashing* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori dan data panel periode 2021–2025. Sampel dipilih melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan ketersediaan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, sehingga diperoleh 32 observasi dari 10 perusahaan. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan, *sustainability report*, dan publikasi resmi Bursa Efek Indonesia. Praktik *greenwashing* diukur menggunakan pendekatan *disclosure–performance gap*, dengan proporsi komisaris independen perempuan sebagai variabel independen utama. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Common Effect Model* (CEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen perempuan dan total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *greenwashing*. Sebaliknya, ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap praktik *greenwashing*. Secara simultan, proporsi komisaris independen perempuan, total aset, ukuran dewan komisaris, dan ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap praktik *greenwashing*. Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 59,03% menunjukkan bahwa variabel independen dalam model mampu menjelaskan 59,03% variasi praktik *greenwashing*, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Kata Kunci: Komisaris Independen Perempuan; Greenwashing; Pelaporan Keberlanjutan; Tata Kelola Perusahaan.

Abstract

This study aims to examine the effect of the proportion of female independent commissioners on greenwashing practices among companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This research employs a quantitative approach with an explanatory design using panel data for the 2021–2025 period. The sample was selected through a purposive sampling technique based on the availability of annual reports and sustainability reports, resulting in 32 observations from 10 companies. The study utilizes secondary data obtained from annual reports, sustainability reports, and official publications of the Indonesia Stock Exchange. Greenwashing practices are measured using the disclosure–performance gap approach, while the proportion of female independent commissioners serves as the primary independent variable. Data analysis was conducted using panel data regression with the Common Effect Model (CEM) approach. The findings indicate that the proportion of female independent commissioners and total assets do not have a significant effect on greenwashing practices. In contrast, board of commissioners size and board of directors size significantly influence greenwashing practices. Simultaneously, the proportion of female independent commissioners, total assets, board of commissioners size, and board of directors size have a significant effect on greenwashing practices. The Adjusted R-squared value of 59.03% indicates that the independent variables in the model explain 59.03% of the variation in greenwashing practices, while the remaining variation is explained by other factors outside the research model.

Keywords: Board Gender Diversity; Greenwashing; Corporate Governance; Sustainability Reporting; Corporate Governance.

PENDAHULUAN

Keberlanjutan menjadi elemen strategis yang memengaruhi daya saing, keberlangsungan, dan penciptaan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Perubahan ini didorong oleh meningkatnya perhatian investor, regulator, lembaga pemeringkat, dan masyarakat terhadap praktik bisnis berkelanjutan, sehingga keberlanjutan menjadi faktor penting dalam pengelolaan risiko, keputusan investasi, dan peningkatan nilai perusahaan (Eccles & Klimenko, 2019). Sejalan dengan meningkatnya tuntutan terhadap transparansi keberlanjutan, perusahaan semakin didorong untuk menyampaikan informasi terkait kinerja lingkungan dan sosial melalui laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Namun, peningkatan praktik pengungkapan keberlanjutan juga menimbulkan tantangan baru, yaitu adanya potensi ketidaksesuaian antara informasi keberlanjutan yang dikomunikasikan perusahaan dengan kinerja lingkungan yang sebenarnya. Kondisi tersebut dapat mendorong munculnya praktik *greenwashing*, yaitu strategi perusahaan dalam membangun citra ramah lingkungan melalui pengungkapan yang berlebihan, selektif, atau tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual perusahaan.

Urgensi penerapan praktik bisnis berkelanjutan semakin menguat seiring meningkatnya kompleksitas krisis lingkungan global. World Economic Forum (WEF) dalam *The Global Risks Report 2025* menempatkan cuaca ekstrem, hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan sistem bumi, kelangkaan sumber daya alam, dan kegagalan mitigasi perubahan iklim sebagai kelompok risiko global dengan dampak jangka panjang paling besar terhadap perekonomian dunia. (World Economic Forum, 2025). Risiko-risiko tersebut tidak lagi dipandang sebagai persoalan ekologis semata, tetapi telah berkembang menjadi risiko strategis yang memengaruhi ketahanan rantai pasok, biaya produksi, stabilitas investasi, hingga keberlanjutan model bisnis perusahaan. Dengan demikian, keberhasilan perusahaan dalam mengelola isu lingkungan tidak hanya menentukan legitimasi sosial, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mempertahankan keunggulan kompetitif (United Nations, 2023).

Perubahan tersebut turut mendorong meningkatnya perhatian terhadap implementasi prinsip ESG. Studi terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja ESG yang baik cenderung memiliki tingkat risiko yang lebih rendah, akses pendanaan yang lebih baik, serta nilai perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang mengabaikan aspek keberlanjutan (Friede et al., 2015; Gillan et al., 2021). Kondisi tersebut menyebabkan investor institusional semakin menjadikan informasi ESG sebagai dasar dalam mengevaluasi kualitas tata kelola perusahaan dan prospek keberlanjutan bisnis.

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, berbagai negara memperkuat regulasi pelaporan keberlanjutan. Di Indonesia, hal ini diwujudkan melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan serta mengungkapkannya melalui laporan keberlanjutan. Kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap SDGs, khususnya terkait pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, inovasi industri, konsumsi bertanggung jawab, dan aksi perubahan iklim (United Nations, 2023).

Periode pelaporan tahun 2025, sebanyak 873 perusahaan atau sekitar 97% dari perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keberlanjutan sebagai bagian dari kewajiban keterbukaan informasi kepada publik. Tingginya tingkat penyampaian laporan keberlanjutan tersebut mencerminkan semakin besarnya perhatian perusahaan terhadap pentingnya akuntabilitas lingkungan dan sosial dalam memperoleh legitimasi dari para pemangku kepentingan. (Global Reporting Initiative, 2021; Gillan et al., 2021)

Meskipun demikian, tingginya tingkat kepatuhan dalam penyampaian laporan keberlanjutan belum tentu mencerminkan tingginya kualitas informasi yang diungkapkan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sebagian perusahaan masih memanfaatkan laporan keberlanjutan sebagai instrumen legitimasi dengan menyampaikan narasi lingkungan yang lebih positif dibandingkan kondisi aktual perusahaan. Praktik tersebut dikenal sebagai *greenwashing*, yaitu tindakan perusahaan yang secara sengaja atau tidak sengaja memberikan kesan bahwa aktivitas bisnisnya lebih ramah lingkungan daripada kondisi sebenarnya melalui pengungkapan informasi yang selektif, berlebihan, atau menyesatkan (Delmas & Burbano, 2011; Lyon & Montgomery, 2015).

Fenomena *greenwashing* menjadi isu yang semakin penting karena dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek reputasi perusahaan, tetapi juga memengaruhi efisiensi pasar modal dan efektivitas kebijakan keuangan berkelanjutan. Informasi keberlanjutan yang bias dapat meningkatkan asimetri informasi, menyebabkan kesalahan alokasi investasi, serta mendorong investor memberikan penilaian

yang keliru terhadap kualitas perusahaan. (Lyon & Montgomery, 2015) Dalam jangka panjang, praktik *greenwashing* berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap sistem pelaporan keberlanjutan dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, meningkatnya jumlah laporan keberlanjutan harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang mampu menjamin integritas dan kualitas informasi yang diungkapkan perusahaan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan dalam menekan praktik *greenwashing* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas mekanisme *corporate governance*. Tata kelola perusahaan yang baik berperan dalam mengurangi konflik kepentingan, memperkuat fungsi pengawasan, serta meningkatkan akuntabilitas manajemen dalam menyampaikan informasi kepada para pemangku kepentingan (Jensen & Meckling, 1976). Dengan demikian, karakteristik dewan komisaris menjadi salah satu faktor yang diperkirakan memengaruhi kualitas pelaporan keberlanjutan dan kecenderungan perusahaan melakukan *greenwashing*. Di antara berbagai karakteristik tersebut, keberagaman gender dewan komisaris menjadi perhatian yang semakin besar karena diyakini mampu meningkatkan independensi pengawasan, kualitas diskusi strategis, sensitivitas terhadap kepentingan pemangku kepentingan, serta orientasi terhadap keberlanjutan perusahaan (Byron & Post, 2016).

Meningkatnya praktik *greenwashing* mendorong berkembangnya berbagai penelitian yang berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kredibilitas pelaporan keberlanjutan perusahaan. Secara umum, perkembangan literatur mengenai *greenwashing* menunjukkan pergeseran fokus penelitian dari aspek konseptual menuju mekanisme tata kelola perusahaan. Penelitian generasi awal lebih banyak menjelaskan *greenwashing* sebagai strategi legitimasi perusahaan dalam merespons meningkatnya tekanan publik terhadap isu lingkungan. Dalam perspektif ini, perusahaan cenderung menggunakan pengungkapan lingkungan sebagai sarana membangun citra positif tanpa diikuti oleh peningkatan kinerja lingkungan yang sesungguhnya. (Delmas & Burbano, 2011; Lyon & Montgomery, 2015) Seiring meningkatnya perhatian terhadap kualitas tata kelola perusahaan, penelitian mutakhir mulai menempatkan *corporate governance* sebagai mekanisme utama yang mampu membatasi perilaku oportunistik manajemen dan meningkatkan kredibilitas pelaporan keberlanjutan.

Temuan empiris internasional memberikan bukti yang semakin konsisten mengenai pentingnya keberagaman gender dalam menekan praktik *greenwashing*. (Cotugno et al., 2025) menggunakan 1.300 *firm-year observations* perusahaan publik di Eropa dan mengembangkan ukuran *greenwashing* berbasis *disclosure-performance gap*, yaitu kesenjangan antara tingkat pengungkapan lingkungan dengan kinerja lingkungan aktual perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi perempuan dalam dewan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik *greenwashing*. Perusahaan dengan representasi perempuan yang lebih tinggi cenderung menyampaikan informasi keberlanjutan yang lebih konsisten dengan kinerja lingkungan sebenarnya, sehingga memperkuat kredibilitas pelaporan keberlanjutan.

Pendekatan *disclosure-performance gap* yang digunakan oleh Cotugno et al., (2025) menjadi relevan untuk diterapkan dalam konteks perusahaan di Indonesia karena peningkatan praktik pelaporan keberlanjutan belum selalu mencerminkan peningkatan kinerja lingkungan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut diadaptasi dengan membandingkan tingkat pengungkapan informasi lingkungan perusahaan melalui *sustainability report* dengan indikator kinerja lingkungan yang tersedia pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, pengukuran *greenwashing* tidak hanya melihat seberapa luas perusahaan mengungkapkan informasi keberlanjutan, tetapi juga menilai kesesuaian antara klaim keberlanjutan yang disampaikan dengan pencapaian lingkungan aktual perusahaan.

Selain memengaruhi praktik *greenwashing*, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam struktur dewan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola, transparansi perusahaan, dan perhatian terhadap isu keberlanjutan. Dewan dengan representasi gender yang lebih beragam cenderung memiliki mekanisme pengawasan yang lebih kuat karena adanya variasi perspektif dalam proses pengambilan keputusan (Adams & Ferreira, 2009). Selain itu, keberagaman gender dalam dewan juga berhubungan dengan peningkatan praktik tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dan kualitas pengungkapan lingkungan (Bear et al., 2010; Liao et al., 2015). Meskipun penelitian mengenai *greenwashing* terus berkembang, bukti empiris di Indonesia masih terbatas dan umumnya berfokus pada karakteristik tata kelola secara umum, seperti ukuran dewan, komisaris independen, komite audit, dan struktur kepemilikan. Selain itu, studi mengenai

keberagaman gender lebih banyak mengkaji pengaruhnya terhadap pengungkapan ESG dan *sustainability reporting*, bukan terhadap praktik *greenwashing* secara langsung. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa peran komisaris independen perempuan dalam mengurangi *greenwashing* pada perusahaan publik Indonesia masih perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen perempuan terhadap *greenwashing* menggunakan pendekatan *disclosure–performance gap*.

METODE

Pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori (*explanatory research*) digunakan sebagai metode penelitian. Sampel dipilih melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan ketersediaan laporan tahunan, laporan keberlanjutan, informasi struktur dewan komisaris dan direksi, serta data pendukung pengukuran variabel penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 10 perusahaan dengan 32 observasi *firm-year*. Data penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan perusahaan dan publikasi resmi terkait. Data penelitian berupa data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan, situs resmi BEI periode 2021–2025., dan situs resmi perusahaan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah praktik *greenwashing*. Pengukuran *greenwashing* menggunakan pendekatan *disclosure–performance gap* yang diadaptasi dari Cotugno et al., (2025). Praktik *greenwashing* diukur menggunakan pendekatan *disclosure–performance gap* dengan membandingkan tingkat pengungkapan lingkungan dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*) dan kinerja lingkungan perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan lingkungan tinggi namun tidak didukung oleh pencapaian lingkungan yang sejalan dikategorikan memiliki indikasi *greenwashing* yang lebih besar. Variabel independen penelitian ini adalah proporsi komisaris independen perempuan, yang diukur berdasarkan perbandingan jumlah komisaris independen perempuan terhadap total anggota dewan komisaris.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pemilihan model melalui *Chow test*, *Hausman test*, dan *Lagrange Multiplier (LM) test* untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Estimasi akhir dilakukan menggunakan *Panel Estimated Generalized Least Squares* (EGLS) dengan pendekatan *cross-section weights* untuk menghasilkan estimasi yang lebih efisien. Pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat signifikansi 5% dan 10% untuk pengaruh marginal dengan bantuan perangkat lunak EViews 12.

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil.

Tabel 1. Daftar Sampel

Perusahaan	Tahun	Green washing	Total BOC	Komisaris Independen Perempuan	Total BOD	Total Aset
Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero)	2021	0,23	6	1	6	Rp125.245.072.940.850
Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero)	2022	0,23	6	1	6	Rp115.765.294.391.170
Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero)	2023	0,03	6	1	6	Rp101.595.276.214.860
Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero)	2024	0,03	7	1	7	Rp99.864.257.547.450
Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero)	2025	0,03	6	1	7	Rp88.811.475.006.750
Petrosea Tbk,	2022	0,09	8	0	5	Rp9.283.277.300.000
Mitrabara Adiperdana Tbk,	2024	0,01	2	0	4	Rp3.816.324.107.650
Mitrabara Adiperdana Tbk,	2025	0,27	2	0	4	Rp4.205.157.361.250
Medco Energi Internasional Tbk	2022	0,29	3	0	5	Rp107.895.114.181.690
Medco Energi Internasional Tbk	2023	0,18	3	0	5	Rp114.974.728.961.255
Medco Energi Internasional Tbk	2024	0,09	3	0	5	Rp127.543.665.972.850

Perusahaan	Tahun	Green washing	Total BOC	Komisaris Independen Perempuan	Total BOD	Total Aset
Medco Energi Internasional Tbk	2025	0,49	3	0	5	Rp139.447.406.608.875
Bumi Resources Tbk,	2023	0,23	8	0	15	Rp64.700.477.455.320
Bumi Resources Tbk,	2024	0,18	8	0	13	Rp66.989.123.328.930
Bumi Resources Tbk,	2025	0,29	7	0	12	Rp70.345.318.831.875
Bukit Asam (Persero) Tbk,	2021	0,03	6	0	6	Rp36.123.703.000.000
Bukit Asam (Persero) Tbk,	2022	0,03	6	0	5	Rp45.359.207.000.000
Bukit Asam (Persero) Tbk,	2023	0,03	6	0	5	Rp38.765.189.000.000
Bukit Asam (Persero) Tbk,	2024	0,43	6	0	5	Rp41.785.576.000.000
Bukit Asam (Persero) Tbk,	2025	0,43	7	1	6	Rp43.917.063.000.000
Bayan Resources Tbk,	2024	0,27	6	0	11	Rp56.660.225.978.060
Apexindo Pratama Duta Tbk,	2023	0,58	3	0	4	Rp3.960.321.706.255
Apexindo Pratama Duta Tbk,	2024	0,47	3	0	5	Rp4.038.585.977.500
Apexindo Pratama Duta Tbk,	2025	0,52	3	0	4	Rp4.376.420.366.625
Alamtri Resources Indonesia Tb	2023	0,03	5	0	6	Rp161.227.385.845
Alamtri Resources Indonesia Tb	2024	0,03	5	0	6	Rp107.837.223.430
Alamtri Resources Indonesia Tb	2025	0,03	6	0	3	Rp113.673.358.275
AKR Corporindo Tbk,	2021	0,38	3	0	7	Rp23.508.585.736
AKR Corporindo Tbk,	2022	0,49	3	0	7	Rp27.187.608.036
AKR Corporindo Tbk,	2023	0,49	3	0	7	Rp30.296.571.806
AKR Corporindo Tbk,	2024	0,49	3	0	7	Rp33.108.684.368
AKR Corporindo Tbk,	2025	0,49	3	0	7	Rp36.562.281.257

(Sumber: Data Diolah, 2026)

Estimasi Model Regresi Data Panel

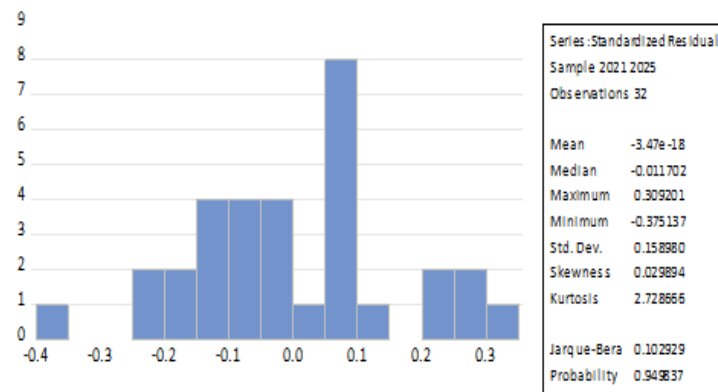
Tabel 2. Hasil Uji LM

Uji	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.802434 (0.3704)	0.424794 (0.5146)	1.227228 (0.2679)
Honda	0.895787 (0.1852)	-0.651762 (0.7427)	0.172552 (0.4315)
King-Wu	0.895787 (0.1852)	-0.651762 (0.7427)	-0.031383 (0.5125)
Standardized Honda	2.815654 (0.0024)	-0.496590 (0.6903)	-2.202589 (0.9862)
Standardized King-Wu	2.815654 (0.0024)	-0.496590 (0.6903)	-2.295308 (0.9891)
Gourieroux, et al.	--	--	0.802434 (0.3526)

Berdasarkan hasil *Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (LM) Test*, diperoleh nilai probabilitas *Cross-section* sebesar 0,3704 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol (H_0) tidak dapat ditolak, sehingga model yang lebih sesuai antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM) adalah *Common Effect Model* (CEM).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

**Gambar 1.** Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Jarque-Bera* sebesar 0,102929 dengan probabilitas 0,949837. Karena nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,05), maka H_0 tidak ditolak, yang menunjukkan bahwa residual model berdistribusi normal. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan kelayakan distribusi residual sehingga hasil estimasi regresi dapat diinterpretasikan secara akurat. Meskipun normalitas residual bukan persyaratan utama dalam regresi data panel dengan jumlah observasi yang memadai, pengujian tetap dilakukan sebagai bagian dari evaluasi model.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	KOMISARIS INDEPENDEN PEREMPUAN	TOTALASET	TOTAL BOC	TOTAL BOD
KOMISARIS INDEPENDEN PEREMPUAN	1	0.492582	0.378756	-0.018835
TOTAL_ASET	0.492582	1	0.248138	0.154215
TOTAL_BOC	0.378756	0.248138	1	0.505460
TOTAL_BOD	-0.018835	0.154215	0.505460	1

Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai korelasi antarvariabel di bawah batas 0,80 berdasarkan matriks korelasi yang diperoleh. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel independen masih berada dalam tingkat yang dapat diterima dan tidak menunjukkan adanya korelasi yang tinggi. Dengan demikian, model regresi penelitian tidak mengalami permasalahan multikolinearitas, sehingga seluruh variabel independen dapat digunakan secara bersamaan dalam proses estimasi model.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KOMISARIS_INDEPENDEN_PEREMPUAN	0.012560	0.032130	0.390921	0.7158
TOTAL_ASET	-1.78E-16	2.89E-16	-0.613787	0.5725
TOTAL_BOC	0.001663	0.008521	0.195191	0.8548
TOTAL_BOD	-0.013916	0.006572	-2.117604	0.1016
C	0.206466	0.024919	8.285383	0.0012

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan pendekatan *cross-section weights* menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai probabilitas di atas tingkat signifikansi 5% (0,05). Dengan demikian, model penelitian tidak menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas. Pendekatan *cross-section weights* digunakan untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik antarperusahaan dan meningkatkan efisiensi estimasi model panel. Sementara itu, peringatan *reduced rank* pada matriks kovarians tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas, melainkan berkaitan dengan keterbatasan struktur data dan proses estimasi matriks kovarians.

Regresi Data Panel CEM dan Analisis

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model regresi data panel, penelitian ini menggunakan *Common Effect Model* (CEM) sebagai model estimasi akhir. Selanjutnya, untuk memperoleh estimasi yang lebih efisien dengan mempertimbangkan karakteristik antarperusahaan (*cross-section*), model diestimasi menggunakan pendekatan *cross-section weights* untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas sehingga metode otomatis berubah dari Panel OLS menjadi metode *Panel Estimated Generalized Least Squares* (EGLS) dan standar error serta kovarians berbasis *Panel-Corrected Standard Errors* (PCSE). Hasil estimasi regresi data panel disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Regresi Data Panel Common Effect Model (CEM)
dengan Estimasi Panel EGLS Cross-section Weights

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KOMISARIS_INDEPENDEN_PEREMPUAN	0.029152	0.067350	0.432835	0.6686
TOTAL_ASET	-1.06E-15	5.31E-16	-2.000324	0.0556
TOTAL_BOC	-0.063899	0.007915	-8.073421	0.0000
TOTAL_BOD	0.022262	0.005714	3.895774	0.0006
C	0.472044	0.047732	9.889496	0.0000
Weighted Statistics				
Statistik	Nilai	Statistik	Nilai	
Root MSE	0.149637	R-squared	0.643162	
Mean dependent var	0.505512	Adjusted R-squared	0.590297	
S.D. dependent var	0.775133	S.E. of regression	0.162905	
Sum squared resid	0.716523	F-statistic	1.216.613	
Durbin-Watson stat	1.103.683	Prob(F-statistic)	0.000009	

Berdasarkan hasil estimasi model, variabel proporsi komisaris independen perempuan menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,029152 dengan nilai *t-statistic* 0,432835 dan probabilitas 0,6686. Nilai probabilitas tersebut melebihi batas signifikansi 5% (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan komisaris independen perempuan belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik *greenwashing*. Meskipun koefisien menunjukkan arah hubungan positif, hubungan tersebut belum cukup kuat secara statistik untuk menjelaskan perubahan praktik *greenwashing* pada perusahaan sampel.

Variabel total aset menunjukkan koefisien regresi sebesar -1,06E-15, nilai *t-statistic* -2,000324, dan probabilitas 0,0556. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang diprosikan melalui total aset belum memberikan pengaruh signifikan pada tingkat 5% (0,05). Namun, pada tingkat signifikansi 10%, variabel tersebut menunjukkan pengaruh negatif marginal. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan aset yang lebih besar cenderung memiliki tingkat *greenwashing* yang lebih rendah, meskipun hubungan tersebut belum memiliki kekuatan statistik yang kuat.

Selanjutnya, ukuran dewan komisaris (*Board of Commissioners/BOC*) memiliki koefisien regresi sebesar -0,063899, nilai *t-statistic* -8,073421, dan probabilitas 0,0000. Hasil pengujian membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik *greenwashing*. Dengan asumsi variabel lain tetap, peningkatan satu anggota dewan komisaris akan menurunkan nilai *greenwashing* sebesar 0,063899. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pengawasan yang lebih besar dalam struktur dewan komisaris dapat memperkuat kontrol terhadap kualitas informasi keberlanjutan perusahaan.

Sementara itu, variabel ukuran dewan direksi (*Board of Directors/BOD*) memperoleh koefisien regresi sebesar 0,022262, nilai *t-statistic* 3,895774, dan probabilitas 0,0006. Hasil tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik *greenwashing*. Artinya, setiap peningkatan satu anggota dewan direksi akan meningkatkan nilai *greenwashing* sebesar 0,022262, dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur direksi yang semakin besar tidak selalu meningkatkan efektivitas pengelolaan keberlanjutan, karena kompleksitas koordinasi dan pengambilan keputusan dapat menciptakan potensi ketidaksesuaian antara kebijakan keberlanjutan dan implementasinya.

Nilai konstanta model sebesar 0,472044 dengan probabilitas 0,0000 menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen bernilai nol, tingkat *greenwashing* diprediksi berada pada nilai 0,472044. Selain itu, hasil pengujian simultan menunjukkan nilai probabilitas *F-statistic* sebesar 0,000009, yang lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi 5% (0,05). Dengan demikian, variabel proporsi komisaris independen perempuan, total aset, ukuran dewan komisaris, dan ukuran dewan direksi secara bersama-sama terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *greenwashing*. Namun, hasil uji F hanya menunjukkan tingkat signifikansi model secara keseluruhan dan tidak menggambarkan pengaruh masing-masing variabel secara individual.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *greenwashing*. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan representasi perempuan dalam dewan komisaris belum secara langsung mampu mengurangi praktik *greenwashing* pada perusahaan sampel penelitian. Dalam perspektif *Agency Theory*, keberadaan komisaris independen perempuan seharusnya dapat memperkuat fungsi monitoring terhadap tindakan oportunistik manajemen. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan secara struktural belum cukup untuk menjamin efektivitas fungsi pengawasan apabila tidak didukung oleh independensi substantif, kompetensi, pengalaman, serta keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan keberlanjutan.

Temuan penelitian ini berbeda dengan Kyaw et al., (2022) yang menunjukkan bahwa keberagaman gender dalam dewan berhubungan positif dengan peningkatan kinerja lingkungan perusahaan melalui peran dewan dalam mendorong strategi lingkungan dan pengurangan emisi. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan Ghitti et al., (2024) yang menunjukkan bahwa hubungan antara karakteristik dewan dan praktik *greenwashing* tidak selalu bersifat konsisten. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam dewan tidak secara otomatis menjamin penurunan praktik *greenwashing*, karena efektivitasnya dapat dipengaruhi oleh konteks perusahaan, karakteristik tata kelola, serta sejauh mana anggota dewan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara substantif. Selain itu, penelitian Lestari & Adi, (2025) pada konteks perusahaan Indonesia juga menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam dewan belum secara otomatis menurunkan praktik *greenwashing*. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh representasi perempuan dalam dewan sangat bergantung pada konteks institusional, karakteristik perusahaan, serta kualitas mekanisme tata kelola yang diterapkan.

Berdasarkan perspektif *Upper Echelons Theory*, keberadaan perempuan dalam struktur dewan dapat memberikan variasi perspektif dan nilai dalam proses pengambilan keputusan. Namun, pengaruh tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan individu perempuan dalam struktur organisasi, melainkan juga oleh sejauh mana pandangan dan kompetensi tersebut dapat memengaruhi keputusan strategis perusahaan. Oleh karena itu, representasi perempuan secara kuantitatif belum tentu menghasilkan perubahan perilaku perusahaan terhadap praktik keberlanjutan.

Dalam perspektif *Stakeholder Theory*, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi keberlanjutan yang transparan dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen perempuan belum menjadi mekanisme yang cukup kuat dalam memastikan kesesuaian antara pengungkapan keberlanjutan dan kinerja lingkungan aktual perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini mengindikasikan bahwa efektivitas tata kelola dalam mengurangi *greenwashing* tidak hanya bergantung pada komposisi gender dewan, tetapi juga pada kualitas pengawasan dan keterlibatan nyata anggota dewan dalam agenda keberlanjutan.

Berbeda dengan keberagaman gender, ukuran dewan komisaris menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap *greenwashing*. Artinya, semakin besar ukuran dewan komisaris, semakin rendah kecenderungan *greenwashing*. Temuan ini sejalan dengan Lestari & Adi, (2025) yang menemukan bahwa ukuran dewan berpengaruh negatif terhadap *greenwashing* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pengawasan dapat memperkuat monitoring terhadap manajemen dan meningkatkan perhatian terhadap kesesuaian antara

pengungkapan keberlanjutan dan kinerja lingkungan aktual. Namun, temuan ini berbeda dengan Ghitti et al., (2024) yang tidak menemukan bukti konklusif mengenai pengaruh ukuran dewan terhadap *greenwashing*. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas ukuran dewan dapat bergantung pada konteks institusional dan karakteristik tata kelola perusahaan. Adams & Ferreira, (2009) menjelaskan bahwa karakteristik dewan, termasuk kemampuan melakukan monitoring terhadap manajemen, berperan penting dalam menentukan efektivitas tata kelola perusahaan. Selain itu, Coles et al., (2008) menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap struktur dan ukuran dewan dapat berbeda sesuai dengan kompleksitas perusahaan serta karakteristik operasionalnya. Dalam konteks penelitian ini, pengaruh negatif ukuran dewan komisaris mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas pengawasan melalui jumlah anggota dewan yang lebih besar dapat menjadi mekanisme yang mendukung pengendalian praktik *greenwashing*.

Sebaliknya, ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *greenwashing*. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah anggota direksi justru berkaitan dengan meningkatnya *greenwashing*. Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui perbedaan fungsi antara dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan komisaris berperan terutama dalam fungsi pengawasan, sedangkan dewan direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelaksanaan strategi perusahaan. Ukuran direksi yang lebih besar dapat memberikan tambahan sumber daya dan perspektif, tetapi juga berpotensi meningkatkan kompleksitas koordinasi, konflik kepentingan, dan ketidakjelasan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut dapat menciptakan ruang bagi pengungkapan keberlanjutan yang lebih bersifat simbolik daripada substantif. Temuan ini juga memperkuat pentingnya membedakan ukuran organ pengawasan dan organ eksekutif dalam menganalisis *greenwashing*, karena pengaruh keduanya dalam penelitian ini menunjukkan arah yang berlawanan.

Variabel total aset memiliki koefisien regresi sebesar $-1.06E-15$ dengan nilai *p-value* sebesar 0,0556. Hasil tersebut menunjukkan bahwa total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *greenwashing* pada tingkat signifikansi 5%, meskipun terdapat indikasi pengaruh negatif pada tingkat signifikansi 10%. Dengan demikian, perusahaan dengan ukuran aset yang lebih besar cenderung memiliki tingkat *greenwashing* yang lebih rendah, tetapi bukti empiris dalam penelitian ini belum cukup kuat untuk menyatakan adanya pengaruh yang signifikan pada tingkat signifikansi konvensional 5%. Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan publik, investor, regulator, dan tuntutan reputasi yang lebih besar pada perusahaan berskala besar belum secara otomatis menjamin kualitas pengungkapan lingkungan yang lebih kredibel. Faktor tata kelola yang lebih spesifik, seperti efektivitas fungsi pengawasan dewan, kualitas pengelolaan ESG, *assurance* laporan keberlanjutan, serta kompetensi pengurus, dapat menjadi faktor lain yang berperan dalam membatasi praktik *greenwashing*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik tata kelola perusahaan memiliki pengaruh yang tidak seragam terhadap praktik *greenwashing*. Proporsi komisaris independen perempuan tidak menunjukkan pengaruh signifikan, sedangkan ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap praktik *greenwashing*. Pola hasil tersebut mengindikasikan bahwa dalam konteks perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini, efektivitas mekanisme tata kelola tidak hanya berkaitan dengan komposisi dewan, tetapi juga dengan bagaimana fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan dijalankan. Oleh karena itu, temuan penelitian ini memberikan indikasi bahwa efektivitas dewan (*board effectiveness*) dapat menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengendalian *greenwashing*, meskipun kesimpulan tersebut terbatas pada karakteristik sampel dan periode penelitian yang digunakan. Dengan demikian, keberadaan perempuan dalam dewan komisaris belum secara otomatis menghasilkan peningkatan kualitas pelaporan lingkungan. Agar representasi perempuan dapat memberikan dampak yang lebih substantif, perusahaan perlu memastikan bahwa keberagaman gender didukung oleh independensi, kompetensi keberlanjutan, serta kewenangan pengawasan yang memadai dalam proses pengambilan keputusan perusahaan.

SIMPULAN

Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen perempuan tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *greenwashing*. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan dalam dewan komisaris belum secara empiris mampu menekan perbedaan antara pengungkapan keberlanjutan perusahaan dan kondisi lingkungan yang sebenarnya. Sebaliknya, ukuran dewan komisaris ditemukan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *greenwashing*, yang mengindikasikan bahwa kapasitas pengawasan yang lebih besar dapat

meningkatkan pengendalian atas kualitas informasi keberlanjutan. Sementara itu, ukuran dewan direksi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap *greenwashing*, yang mengindikasikan bahwa struktur direksi yang semakin besar belum tentu meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi lingkungan. Variabel total aset tidak menunjukkan pengaruh signifikan pada tingkat signifikansi 5%, namun memiliki indikasi hubungan negatif pada tingkat signifikansi 10%.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas kajian tata kelola perusahaan dengan menunjukkan bahwa mekanisme struktural dewan memiliki peran yang berbeda dalam menjelaskan praktik *greenwashing*. Temuan penelitian menegaskan bahwa efektivitas tata kelola tidak hanya ditentukan oleh keberadaan representasi tertentu dalam dewan, tetapi juga oleh kualitas fungsi pengawasan, koordinasi, dan pengambilan keputusan. Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen perempuan perlu didukung oleh kompetensi, keterlibatan aktif, dan efektivitas pengawasan agar mampu meningkatkan kredibilitas laporan keberlanjutan. Bagi investor dan regulator, temuan ini menekankan pentingnya mengevaluasi kualitas mekanisme tata kelola perusahaan, bukan hanya struktur formal dewan, dalam menilai keandalan informasi keberlanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Politeknik Negeri Jakarta atas dukungan dan pendanaan melalui Skema Utama Berdampak Penelitian Asisten Ahli [Nomor kontrak 317/DST/PL3.14/B/PT.00.03/2026] yang mendukung terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R. B., & Ferreira, D. (2009). Women in the boardroom and their impact on governance and performance. *Journal of Financial Economics*, 94(2), 291–309. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.10.007>
- Bear, S., Rahman, N., & Post, C. (2010). The impact of board diversity and gender composition on corporate social responsibility and firm reputation. *Journal of Business Ethics*, 97, 207–221. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0505-2>
- Byron, K., & Post, C. (2016). Women on boards of directors and corporate social performance: A meta-analysis. *Corporate Governance: An International Review*, 24(4), 428–442. <https://doi.org/10.1111/corg.12165>
- Coles, J. L., Daniel, N. D., & Naveen, L. (2008). Boards: Does one size fit all? *Journal of Financial Economics*, 87(2), 329–356. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.08.008>
- Cotugno, M., Ferilli, G. B., & Palmieri, E. (2025). Does board gender diversity make firms less greenwashed? In *Business Ethics, the Environment & Responsibility*. Advance online publication.
- Delmas, M. A., & Burbano, V. C. (2011). The drivers of greenwashing. *California Management Review*, 54(1), 64–87. <https://doi.org/10.1525/cmr.2011.54.1.64>
- Eccles, R. G., & Klimenko, S. (2019). The investor revolution. *Harvard Business Review*, 97(3), 106–116.
- Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and financial performance: Aggregated evidence from more than 2,000 empirical studies. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 5(4), 210–233. <https://doi.org/10.1080/20430795.2015.1118917>
- Ghitti, M., Gianfrate, G., & Palma, L. (2024). The agency of greenwashing. *Journal of Management & Governance*, 28(3), 905–941. <https://doi.org/10.1007/s10997-023-09683-8>
- Gillan, S. L., Koch, A., & Starks, L. T. (2021). Firms and social responsibility: A review of ESG and CSR research in corporate finance. *Journal of Corporate Finance*, 66, 101889. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101889>
- Global Reporting Initiative. (2021). *GRI universal standards 2021*. Global Reporting Initiative.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kyaw, K., Treepongkaruna, S., & Jiraporn, P. (2022). Board gender diversity and environmental emissions. *Business Strategy and the Environment*, 31(7), 2871–2881. <https://doi.org/10.1002/bse.3052>
- Lestari, D. I., & Adi, P. P. (2025). Green or greenwashed?: Investigating greenwashing through media,

- innovation, and governance lenses. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 8(1). <https://doi.org/10.33795/jraam.v8i1.007>
- Liao, L., Luo, L., & Tang, Q. (2015). Gender diversity, board independence, environmental committee and greenhouse gas disclosure. *The British Accounting Review*, 47(4), 409–424. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2014.01.002>
- Lyon, T. P., & Montgomery, A. W. (2015). The means and end of greenwash. *Organization & Environment*, 28(2), 223–249. <https://doi.org/10.1177/1086026615575332>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik*.
- United Nations. (2023). *The Sustainable Development Goals Report 2023*.
- World Economic Forum. (2025). *The Global Risks Report 2025* (20th ed.). World Economic Forum.